1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

    1. **PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH DAN ATAU PERKEMBANGAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN PENTING, BARANG LAINNYA DAN JASA SERTA RESIKO KEDEPAN**

    Pada triwulan III tahun 2026 tekanan inflasi di Kabupaten Mamuju masih cukup tinggi dan masih melebihi target sasaran inflasi yang ditetapkan sebesar 2,5±1%, utamanya pada bulan Agustus dan September, dimana pada bulan Juli inflasi berada pada angka 3,20% dan terjadi peningkatan pada bulan Agustus yakni sebesar 3,90%, kemudian terjadi ada penurunan pada bulan September yakni sebesar 3,72%.

    Berikut ini gambaran inflasi yang terjadi sepanjang Triwulan III tahun 2026 di Kabupaten Mamuju :

    - **Bulan Juli 2026**

Pada Juli 2026 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Mamuju sebesar 3,20 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,24.

Tanggal Rilis : 3 Agustus 2026 (Sumber data : BPS Mamuju)

Abstraksi

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,97 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,44 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,70 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,75 persen; kelompok kesehatan sebesar 7,26 persen; kelompok transportasi sebesar 4,32 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 3,56 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,48 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,12 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,74 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,78 persen.

- **Bulan Agustus 2026**

Pada Agustus 2026 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Mamuju sebesar 3,90 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112.81.

Tanggal Rilis : 1 September 2026 (Sumber data : BPS Mamuju)

Abstraksi

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,34 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,36 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,69 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,58 persen; kelompok kesehatan sebesar 6,25 persen; kelompok transportasi sebesar 4,55 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 5,22 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,10 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,25 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,18 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,78 persen.

- **Bulan September 2026**

Pada September 2026 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Mamuju sebesar 3,72 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112.93.

Tanggal Rilis : 1 Oktober 2026 (Sumber data : BPS Mamuju)

Abstraksi

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,41 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,43 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,84 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,32 persen; kelompok kesehatan sebesar 6,25 persen; kelompok transportasi sebesar 4,80 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 5,40 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,11 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 5,25 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,58 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,71 persen.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. **IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENGENDALIAN INFLASI**

Berdasarkan perkembangan inflasi Kabupaten Mamuju pada Juli–September 2026, permasalahan pengendalian inflasi dapat diidentifikasi pada beberapa aspek utama:

Fluktuasi harga komoditas pangan strategis seperti cabai, telur ayam ras, ikan, udang,

1. pisang, dan komoditas pangan lainnya mengalami perubahan yang cukup signifikan.
2. Ketidakstabilan pasokan dan distribusi pangan oleh karena kondisi cuaca
3. Tekanan dari sektor transportasi dengan adanya perubahan tarif atau harga jasa transportasi oleh karena adanya kelangkaan BBM yang membuat antrian panjang di beberapa SPBU daerah khususnya di Pulau Sulawesi, termasuk angkutan udara juga menyebabkan terjadinya peningkatan biaya mobilitas masyarakat sekaligus biaya distribusi barang.
4. Kenaikan harga makanan dan minuman jadi oleh karena adanya kenaikan harga bahan baku pangan, energi, distribusi, dan biaya operasional
5. Keterbatasan cadangan dan produksi pangan local
6. Koordinasi dan intervensi TPID perlu terus diperkuat

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. **PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH**

Dalam rangka pengendalian inflasi di Kabupaten Mamuju, TPID melalui OPD terkait membuat beberapa program dan kegiatan terkait 4K yang dilaksanakan pada triwulan III tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. **KETERJANGKAUAN HARGA**
    1. Program Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
- Kegiatan : Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui Dinas Perdagangan dengan melakukan pemantauan harga setiap harinya untuk 27 Jenis Bapokting pada pasar-pasar yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.
    2. Program Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
- Kegiatan : Operasi Pasar / Pasar Murah **(Dinas Perdagangan)**

Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat utamanya untuk kebutuhan bahan-bahan pokok yang mengalami kelangkaan. Pada kegiatan ini melalui dinas perdagangan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak swasta maupun dengan Bulog.

- Kegiatan : Gerakan Pangan Murah (GPM). **(Dinas Ketahanan Pangan)**

Gerakan Pangan Murah yang telah terlaksana selama triwulan III ini sebanyak 13 kali sehingga sampai dengan triwulan III ini GPM sudah dilaksanakan sebanyak 39 kali.

- Kegiatan : Kios Pangan PAK RAHMAN (Pangan Pokok Murah dan Aman)

Kios Pangan PAK RAHMAN ini adalah salah satu inovasi yang di laksanakan oleh TPID Kabupaten Mamuju melalui Dinas Ketahanan Pangan, didirikan pada tanggal 10 agustus 2025 yang beralamatkan di kantor Dinas Ketahanan Pangan, yang mana kios ini menyediakan 13 jenis bahan pangan di antaranya beras, telur, minyak, bawang dan sebagainya dengan harga 10 - 20% di bawah harga pasar, dan kios ini beroperasi setiap hari kantor.

1. **KETERSEDIAAN PASOKAN**

Pada triwulan III tahun 2026 ini program yang telah dilaksanakan untuk mendukung ketersediaan pasokan adalah sebagai berikut :

- Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
  - Pengadaan Cultivator sebanyak 3 Unit
  - Pengadaan Handsprayer sebanyak 601 Unit
  - Pengadaan Motor Roda 3 sebanyak 2 Unit
  - Pengadaan Traktor Roda 2 sebanyak 18 Unit
- Dinas Kelautan dan Perikanan
  - Pengadaan Mesin Dalam 28 HP sebanyak 18 Unit
  - Pengadaan Mesin Katinting 13 HP, 6,5 HP, dan 5,5 HP sebanyak 110 Unit
  - Pengadaan Gillnet/Pukat sebanyak 52 Unit

1. **KELANCARAN DISTRIBUSI**

Pada triwulan III tahun 2026 program untuk mendukung kelancaran distribusi adalah sebagai berikut :

- Dinas Perdagangan

Subsidi transportasi / subsidi ongkos angkut bahan pangan

- Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
- Pembukaan jalan usaha tani sebanyak 7 paket dengan panjang 6.604 Meter
- Peningkatan jalan usaha tani sebanyak 12 paket dengan Panjang 2.051,5 Meter

1. **KOMUNIKASI EFEKTIF**
2. Peningkatan Koordinasi dan Rapat-Rapat TPID Kabupaten Mamuju
   - Mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi yang di laksanakan oleh Menteri Dalam Negeri RI Via Zoom setiap hari senin atau waktu tertentu
   - Koordinasi dengan TPID Provinsi dan kabupaten lain
3. Rapat Koordinas TPID Kab. Mamuju
4. High Level Meeting TPID Kabupaten Mamuju
5. Sosialisasi Ketahanan Pangan (SIKUPANG)

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. **EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH**

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi Kabupaten Mamuju pada Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan bahwa berbagai langkah stabilisasi harga melalui Gerakan Pangan Murah, pemantauan harga dan stok, penguatan pasokan, kelancaran distribusi serta koordinasi TPID telah dilaksanakan dan berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga. Namun demikian, tekanan inflasi masih dipengaruhi oleh fluktuasi harga pangan, khususnya cabai dan komoditas pangan lainnya, serta faktor distribusi dan transportasi. Oleh karena itu, kebijakan pengendalian inflasi ke depan perlu diarahkan dari pendekatan yang bersifat responsif menuju pendekatan yang lebih preventif dan antisipatif melalui penguatan sistem peringatan dini, peningkatan produksi pangan lokal, penguatan kerja sama antardaerah, jaminan kelancaran distribusi, serta optimalisasi cadangan pangan daerah.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. **REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH**

Untuk memaksimalkan pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Mamuju pada triwulan III 2026 maka TPID membuat rekomendasi :

1. Agar terus melakukan pemantauan harga dan stok pangan di pasar
2. Mengintensifkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah / Pasar Murah
3. Melaksanakan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk menjamin pasokan komiditas strategis
4. **Meningkatkan produksi pangan lokal**, khususnya komoditas yang berulang kali menjadi penyumbang inflasi.
5. **Memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaan BBM**
6. Pempercepat realisasi program kegiatan yang ada pada OPD-OPD Terkait
7. **Memperkuat koordinasi TPID dengan Bulog, BI, BPS, distributor, petani, nelayan, dan pelaku usaha,** sehingga kebijakan lebih berbasis data dan kondisi lapangan.